

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN IDEOLOGI ISLAM

Tri Joko Waluyo

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdiri pada tahun 1973, merupakan hasil fusi dari partai-partai politik Islam (Parmusi, NU, PSII, PERTI). Sampai pemilu 2014, PPP yang semula partai Islam kemudian menjadi partai terbuka dan kemudian kembali menjadi partai Islam kembali. Dalam perjalanan dinamisnya, sebagai partai Islam PPP tidak nampak menonjolkan ideologi Islam sebagai ideologi yang diperjuangkan. Namun upaya identifikasi sebagai partai Islam cukup menonjol.

Dengan mengedepankan teori dan konsep partai politik dan ideologi Islam, penelitian ini berusaha untuk memperoleh hubungan signifikan antara PPP sebagai sebuah partai politik dengan ideologi sebagai semangat penggerak dinamika sepak terjang perjuangan partai ini. Ideologi yang dimaksudkan adalah ideologi Islam.

Deskripsi yang menjelaskan hubungan signifikan antara PPP dan ideologi Islam ini akan diperoleh melalui penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian ini mengandalkan data pustaka dan dokumen-dokumen. Dengan metode penelitian ini diperoleh tesis hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ideologi Islam dalam PPP tidak cukup signifikan diimplementasikan.

Kata-kata kunci : partai, ideologi, Islam.

PENDAHULUAN

Partai Persatuan. Pembangunan (PPP) adalah partai hasil fusi dari partai-partai Islam peserta pemilu tahun 1971. Konfederasi dalam kelompok Persatuan Pembangunan, bagaimanapun, masih mengalami banyak kendala, walaupun pendekatan secara intensif antara partai-partai yang bergabung telah dilakukan. Pada mulanya, PSII secara tegas menyatakan penolakan terhadap fusi partai-partai. H.M. Ibrahim, Ketua PSII, menganggap bahwa hasil pengelompokan di DPR yang berbentuk konfederasi tersebut sudah maksimal. Di samping itu, PSII khawatir, apabila melakukan fusi ke dalam satu partai politik, PSII hanya akan memperoleh posisi yang inferior, mengingat partai politik Islam lainnya, NU misalnya, lebih besar. Dengan demikian, kemungkinan PSII menempati jabatan penting dalam partai

sangatlah kecil. Tetapi pendirian ini berubah setelah pimpinan PSII jatuh ke tangan H. Anwar Cokroaminoto yang memperoleh "restu" dari pemerintah.

Nampaknya, keharusan fusi menjadi satu partai bagi empat partai Islam ini merupakan suatu keterpaksaan yang sebenarnya tidak diinginkan. PPP yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Islam, Berta berlambang tanda gambar Ka'bah ini langsung dihadang oleh masalah-masalah dalaman yang berat. Dalam pedalannya, PPP nampaknya padat dengan konflik dalaman yang dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas. Sumber konflik di antaranya adalah perselisihan antar unsur dalam penyusunan daftar calon anggota DPR, pertentangan tentang jumlah calon masing-masing unsur, apakah mengikuti status quo pa da pemilu-pemilu sebelumnya ataukah perlu perubahan, perebutan posisi pimpinan komisi di DPR. Konflik demikian lebih diperparah oleh usaha penyelesaian konflik yang tidak rasional, misalnya pencoretan beberapa nama calon anggota DPR yang berbobot, dan tidak demokratisnya proses penentuan kepemimpinan partai (Panji Masyarakat 1983). Pemimpin PPP, H. Mintardja dan J. Naro, keduanya dari unsur Parmusi, tidak lahir melalui Mukktamar Partai. Mereka muncul melalui jalur "saling pengertian" elite politik dari keempat unsur dalam partai, yang kemudian mendapat restu dari "atas".

Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang kemudian sejak tahun 1985 secara resmi bukan partai Islam lagi, disertai problematika yang semakin kompleks, memasuki pemilihan umum 1987. Dan, seperti diperkirakan oleh banyak pengamat bahwa PPP akan mengalami kemunduran dan kemerosotan perolehan suara pada pilihan raya tersebut. Terbukti, pada pemilihan raya 1987 suara PPP merosot tajam, hanya 15,25 peratus. Dari 94 kursi di DPR pada tahun 1982, merosot menjadi hanya memperoleh 61 kursi di DPR hasil pemira 1987.

Munculnya peraturan tentang partai politik mendorong terbentuknya beragam partai politik, sama ada dari segi jumlah mahupun ideology politik. Masa setelah kejatuhan Soeharto ini terjadi pembebasan politik aliran, dengan sedikit penyimpangan, untuk tampil secara terbuka dalam panggung politik. Berbagai aliran politik yang pernah tampil pada masa awal kemerdekaan tampil kembali dalam panggung politik. Partai dengan jubah agama, etnis dan ideology nasionalis lahir kembali. Sedikit penyimpangan atau anomaly adalah munculnya partai yang tidak sepenuhnya mengekspresikan aliran secara telanjang, tetapi lebih bercorak pseudo aliran seperti yang terlihat pada PKB dan PAN. Kedua partai tersebut lahir dari rahim aliran, yaitu NU dan Muhammadiyah, tetapi tidak sepenuhnya menggunakan simbol agama dan juga tidak sepenuhnya meninggalkannya.

Pada awalnya PPP berideologi Islam moderat. Partai ini sering disebut sebagai "rumah besar umat Islam", karena berbagai unsur Islam politik terfasilitasi di PPP. Ketika zaman Orde Baru, PPP menjadi articulator perjuangan Islam politik dan tidak jarang mengambil sikap oposisional. PPP kritis terhadap isu-isu yang dipandang

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti misalnya masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN, Undang-Undang Perkawinan, pelebagaan P4, dan azas tunggal Pancasila (Azis, 2006). PPP sebagai partai Islam sempat mengalami dilemma ketika Orde Baru memaksakan azas tunggal Pancasila bagi semua kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan. PPP akhirnya mengganti azas Islam dengan azas Pancasila dan lambang Ka'bah diganti dengan lambang Bintang segi lima.

Pada era reformasi, PPP kembali menggunakan azas Islam dan lambang Ka'bah, tetapi juga sekaligus kehilangan monopolinya sebagai satu-satunya partai Islam. Unsur-unsur yang dulu membentuk PPP kemudian membentuk partai tersendiri (Amir 2003). Namun demikian, kemudian konflik kembali melanda PPP dengan lahirnya PPP Reformasi yang kemudian berganti nama menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Dari sisi perjangkan ideology, pada amandemen UUD 1945 (1999-2002) PPP berusaha memasukkan ideology Islam sekaligus menolak aliran kepercayaan dan komunisme melalui perubahan pasal 29 (Mandan 2009, S ubekti 2008).

Dalam perjuangan politik dari pemilu ke pemilu dan dari parlemen ke parlemen berikutnya, PPP tidak dengan lantang dan tegas mempromosikan dan memperjuangkan ideology Islam. PPP lebih cenderung mengemukakan sebagai partai Islam, partainya umat Islam, partai pembawa aspirasi Islam, partai sebagai rumah besar umat Islam dan lain-lain. PPP sebagai partai politik Islam sebenarnya memiliki legitimasi penuh untuk mempromosikan dan mempeduangkan ideology Islam. PPP seperti inilah yang menarik untuk dikaji, hubungan signifikan antara partai dengan ideology Islam.

PERMASALAHAN

PPP yang menyatakan diri sebagai partai dengan Islam sebagai ideology masih belum menunjukkan ketegasan dan ketegarannya dalam mengedepankan Islam sebagai ideology yang diperjuangkan dalam mencapai Indonesia makmur dan sejahtera. Dalam penelitian ini mengkaji dan menelaah hubungan antara Ideologi Islam dan Partai Persatuan Pembangunan. Seberapa signifikan ideology Islam dalam Partai Persatuan Pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori

Untuk memahami perilaku politik masyarakat dalam pemilu tidak dapat terlepas dari membicarakan sistem demokrasi dan partai politik. Para pakar ilmu politik telah sampai pada suatu aksioma bahwa tidak ada sistem politik yang dapat bertahan tanpa partai politik kecuali pada masyarakat tradisional dan beberapa

masyarakat transisional. Partai politik telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan dan merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan serta untuk pemerintah (Ichlasul Amal 1988). Ia merupakan paket dari kehidupan demokrasi (Bert F. Hoselitz 1988).

Carl J. Friedrich (1982) menghujahkan: "A political party is a group of human being, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages". Sarjana lainnya, Sigmund Neumann (1985), menulis sebagai berikut: "A political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who complete for popular support with another group or groups holding divergent views"

Seharusnya, partai politik berkembang untuk mewakili rakyat, mempengaruhi pergantian kepemimpinan politik baik lokal maupun nasional secara teratur dan damai, menyediakan akses bagi kepelbagaian yang ada serta menyedarkan masyarakat akan erti pentingnya politik dengan segala konsekwensi dan tanggung jawabnya (Ichlasul Amal 1988).

Dari pelbagai takrifan dan rumusan yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa partai politik pada dasarnya berhubungan dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat atau kerajaan. Oleh itu, partai politik merupakan organisasi dari orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama, berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda. Partai politik dalam penelitian ini adalah suatu kelompok politik yang memiliki identitas tertentu serta berusaha memenangkan pemilihan umum untuk menempatkan calon-calonnya dalam lembaga-lembaga legislatif dan pemerintahan serta mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa partai politik bertujuan memimpin negara untuk mencapai kesejahteraan negara. Upaya pemeliharaan kepemimpinan mengharuskan pemimpin negara untuk mampu mempertahankan diri dari serangan musuh, dan yang lebih penting dari itu, pemimpin negara juga harus mampu membangun keabsahannya atau legitimasinya di kalangan warga negaranya. Keabsahan pemimpin negara hanya dapat diwujudkan apabila dalam masyarakat politik terdapat kesepakatan mengenai landasan-landasan yang mendasari aturan main suatu rejim yang diberlakukan. Kesepakatan seperti itu memerlukan suatu ideologi, yaitu sekumpulan nilai-nilai yang hendak dicapai dan cara-cara untuk mencapainya, yang didukung secara luas dalam masyarakat (Mohtar Mas'ood, 2011).

Dengan demikian, partai politik, dengan sendirinya tidak dapat terlepas dari perlunya ideologi partai yang menjadi landasan perjuangan memperoleh posisi kepemimpinan negara. Partai politik yang memiliki ideologi dan konsisten dalam

gerak perjuangannya telah memiliki salah satu potensi dasar untuk mampu mencapai keberhasilan dalam perjuangan kepemimpinannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengemukakan hubungan signifikan antara ideologi Islam dengan Partai Persatuan Pembangunan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang didukung oleh data kualitatif yang diperoleh melalui telah dokumen pustaka. Namun juga dimungkinkan sumber data dari para informan ahli. Lingkup penelitian ini adalah sejak PPP lahir , pada tahun 1973, sampai sekarang.

Partai Persatuan Pembangunan Berazas Islam

Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 menyusul demonstrasi besar-besaran, terutama oleh mahasiswa, di seluruh kota di Indonesia menuntut perubahan. Peristiwa ini menandai awal transisi demokrasi yang kemudian dikenal dengan ‘reformasi’. Partai politik muncul sebagai ekspresi kebebasan dan sebagai protes sekaligus keinginan untuk berperan lebih luas dalam kehidupan politik setelah mengalami pengekangan politik selama masa Orde Baru. Partai politik yang pada masa Orde Baru berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pada masa reformasi lebih bebas yang memunculkan partai-partai yang berasaskan agama dan asas-asas lain, kecuali asas komunisme. Terbentuk sistem kepartaian pluralisme terbatas dan partai politik muncul silih berganti.

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menjadikan kehidupan partai politik pada era reformasi dipenuhi oleh partai yang lahir dengan mengambil inspirasi kepartaian pada masa pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, partai yang dikonstruksi masa Orde Baru, dan partai-partai baru yang tidak memiliki preseden kesejarahan sebelumnya. Hampir semua aliran ideologi dan partai yang pernah hidup pada masa sebelumnya, kecuali komunis, hadir kembali dan bersaing dengan partai-partai yang memang sama sekali baru. Sangat kecil penolakan terhadap dibuangnya format politik dua partai dan satu Golkar dan diperkenalkannya sistem multi partai. Tiba-tiba demokrasi multipartai seolah dilihat sebagai satu-satunya pilihan yang niscaya.

Partai Persatuan Pembangunan yang dideklarasikan pada 5 Januari 1973, merupakan fusi dari partai-partai yang berada pada kelompok spiritual-material, yaitu partai yang menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek material, yang meliputi NU, Parmusi, PSII dan Perti.

Pada awalnya PPP berideologi Islam moderat. Partai ini sering disebut sebagai “rumah besar umat Islam”, karena berbagai unsur Islam politik terfasilitasi di PPP. Ketika zaman Orde Baru, PPP menjadi articulator perjuangan Islam politik dan tidak jarang mengambil sikap oposisional. PPP kritis terhadap isu-isu yang dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti misalnya masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN, Undang-Undang Perkawinan, pelembagaan P4, dan azas tunggal Pancasila.

Pada era reformasi, PPP kembali menggunakan azas Islam dan lambang Ka’bah, tetapi juga sekaligus kehilangan monopolinya sebagai satu-satunya partai Islam. Dari sisi perjuangan ideologi, pada amandemen UUD 1945 (1999-2002) PPP berusaha memasukkan ideologi Islam sekaligus menolak aliran kepercayaan dan komunisme melalui perubahan pasal 29.

Karakteristik Negara Islam adalah bahwa ia merupakan negara ideologis. Dari pengamatan yang cermat atas Al-Quran akan jelas bahwa negara Islam ini berlandaskan suatu ideologi dan bertujuan untuk menegakkan ideologi tersebut. Negara merupakan instrumen reformasi dan harus berperan sebagai instrumen reformasi. Ketentuan dari Negara Islam inilah yang menyebabkan negara tersebut wajib, diselenggarakan oleh orang-orang yang meyakini ideologi Islam serta Hukum Ilahi yang dijunjung tinggi oleh mereka. Penyelenggara suatu Negara Islam haruslah orang-orang yang seluruh kehidupannya dibaktikan untuk menaati dan menegakkan Hukum ini, yang tidak hanya setuju dengan program reformasinya dan sepenuhnya yakin atas program itu, melainkan juga sepenuhnya menghayati semangatnya serta memahami semua rinciannya.

Prinsip-prinsip perjuangan PPP meliputi prinsip ibadah, prinsip *amar ma’ruf nahi mungkar*; prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan dan prinsip *istiqamah*.

Tujuan PPP adalah mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*. Untuk mencapai tujuan tersebut, PPP berkhidmat untuk berjuang, pertama, mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*.

Dipandang dari perspektif Islam sebagai Ideologi, keberadaan PPP dan dinamika perjuangannya tidak dapat dikatakan bahwa PPP adalah partai yang berideologi Islam. Komitmen PPP terhadap ideologi Islam tidak cukup tegas. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa PPP adalah partai Islam dan membawa misi keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, A.Z. 1990, Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru. Solo : Ramadhani.
- Abas, S. 1983. Ftiqad Ahlussunnah Wal damaah. Jakarta : Pustaka Tarbiyah.
- Abdullah, T. 1981. Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta LP3ES.
- Ajie, S.S. 1986. Undang Undang RI NO. : 1 Th. 1985. Semarang : Aneka Ilmu.
- Alfian. 1978. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta :Gramedia.
- Alfian. 1981. Beberapa Masalah Pembaharuan Politik di Indonesia. Jakarta Rajawali Pers
- Alfian. 1986. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta Gramedia.
- Alfian dan Sjamsuddin, N. 1988. Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amal, Ichlasul. 1988. Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Anam, Chairul. 1985. Perkembangan dan Pertumbuhan Nandlatul Ulama. Solo Jatayu.
- Andrain, Charles F. 1970. Political Life and Social Change an Introduction to Political Science. Belmont : Pub. Comp. Cal. Wadswort.
- Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta : LP3ES.
- Babbie, Earl. 1983. The Practice of Social Research. Belmont, California Wadswort Publishing Company.
- Budiardjo, Meriam. 1981. Partaisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Gramedia.

- Budiardjo, Meriam. 1982, Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
- Crouch, Harold. 1978. The Army and Politics in Indonesia. Ithaca and London
Cornell University Press.
- Dewan Pimpinan Pusat PPP. 1984. AD dan ART, Khittah Perjuangan, Pernyataan
Politik PPP. Jakarta : DPP PPP..
- Dewan Pimpkpinan Pusat PPP. 1989. Himpunan Ketetapan Muktamar H Partai
Persatuan Pembangunan. Jakarta : DPP PPP.
- Dhakidae, Daniel. 1981. Partai Politik dan System Kepartaian di Indonesia. Jakarta :
Prisma, LP3ES.
- Duverger, Maurice. 1978. Political Partaies. London : Methuen & Co. Ltd.
- Duverger, Maurice. 1984. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan. Jakarta Bina
Aksara.
- Elderveld, Samuel J. 1964. Political Partaies : A Behavioral Analysis. Chicago Rand
McNally & Co.
- Emerson, Donald K. 1976. Indonesia's Elite : Political Culture and Cultural Politics.
Ithaca : Cornell University Press.
- Fathoni, Khoirul dan Muhammad Zen. 1992. NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwah
dengan Muhammadiyah. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- Gaffar, Afan. 1992. Javanese Voters A Case Study of Election Under A Hegemonic
Party System. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.